

NASIONALISME DALAM HISTORIOGRAFI BUKU AJAR SEJARAH POLRI UNTUK TAMTAMA POLRI TAHUN 1980

Nuzon Sugito, Ratu Aulia
Universitas Pendidikan Indonesia
E-mail: nuzonsugito@gmail.com

***Abstract:** Textbooks in the History of the National Police constitute one of the historiographic works aimed at educational purposes, in order to foster an awareness of the history of the struggle of the police contained in the curriculum of educational institutions and the National Police training, history used as a tool in Education will be influenced by the objectives of the National Police Education contained in the Education Curriculum, the curriculum was created with one of the political foundations of the government to instill a sense of nationalism by ideologizing anything related to the country's instruments, including historiography of the history of the national police textbook in Private Police Education.*

***Keywords:** Historiography, Textbooks, National Police, Nationalism,*

Abstrak: Buku teks pelajaran Sejarah Polri merupakan salah satu karya historiografi yang ditujukan untuk keperluan Pendidikan, dalam rangka menumbuhkan kesadaran sejarah perjuangan kepolisian yang terdapat dalam kurikulum lembaga pendidikan dan pelatihan polri, sejarah digunakan sebagai alat dalam Pendidikan akan dipengaruhi oleh tujuan Pendidikan polri yang tertuang dalam kurikulum Pendidikan, kurikulum tersebut dibuat dengan salah satu landasan politik pemerintah untuk menanamkan rasa nasionalisme dengan cara mengideologisasi apapun yang berhubungan dengan alat negara tersebut, termasuk juga Historiografi buku teks sejarah polri dalam Pendidikan Tamtama Polri.

Kata Kunci : Historiografi, Buku Teks, Polri, Nasionalisme,

PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat dalam penegakan hukum dalam suatu negara, sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban nasional keberhasilan kepolisian Republik Indonesia tidak terlepas dari beberapa aspek penyokong di kepolisian diantaranya adalah dalam bidang perekrutan dan Pendidikan (Tabah, 2013 : 40). Pendidikan kepolisian memiliki peran penting dalam pembentukan karakter polisi yang disiplin, profesional, dan berwibawa. Pendidikan Polri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik di lingkungan Polri berdasarkan Perkapolri No. 4 2010 hal 8 (Lemdiklatpolri, 2010). Pendidikan polri yang ideal tentunya didukung oleh kurikulum Pendidikan polisi yang disusun sedemikian rupa oleh Lembaga Pendidikan dan pelatihan polisi (lemdiklatpol). Kurikulum Pendidikan polisi menurut Perkapolri No 4 tahun 2010 adalah seperangkat pengaturan dan pengelolaan mengenai materi/ bahan pelajaran, metode dan evaluasi hasil pembelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan dan pelatihan tertentu di lingkungan Polri, yang disusun oleh

lemdiklatpol dan terdiri dari beberapa mata pelajaran dasar dalam proses Pendidikan diantaranya terdapat Pendidikan Sejarah perjuangan Polri dimana siswa dipandu dengan Media Pembelajaran Sejarah Perjuang Polri yang selanjutnya disebut buku sejarah polri(Lemdiklatpolri, 2010).

Sejarah bukan hanya sebatas rangkaian fakta fakta tetapi juga sebuah cerita, cerita yang disusun dari hubungan hubungan kenyataan pada peristiwa aslinya dan diberikan tafsiran/interpretasi kepada kejadian tersebut (R. Moh. Ali, 2005: 37), sedangkan Menurut Sunnal dan Haas (dalam Supardan, 2007, hlm 278) mengungkapkan bahwa sejarah merupakan suatu kajian yang kronologis mengenai peristiwa sejarah dan pemberian makna terhadap kebenaran dalam suatu peristiwa melalui pembuktian dengan melalui tahapan-tahapan metode ilmiah sehingga kebenaran dalam suatu peristiwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran yang tujuannya memiliki kaitan dengan pembentukan watak bangsa, dari tujuan tersebut akan mempengaruhi tujuan pelajaran sejarah yang akan berkaitan dengan ideologi dan politik kenegaraan. Pendidikan sejarah juga merupakan salah satu cara untuk melestarikan memori kolektif. Menurut S. Hamid Hasan dalam (Utami, 2011) mengungkapkan bahwa ingatan bersama terbentuk dengan dua cara. Pertama adalah apabila sekelompok orang (masyarakat) tersebut mengalami peristiwa yang sama. Kedua adalah dengan mempelajari peristiwa-peristiwa tersebut melalui cerita sejarah. Cerita sejarah untuk kepentingan Pendidikan adalah media utama pendidikan sejarah dalam membangun dan mengembangkan memori kolektif bangsa. Ingatan atau memori kolektif bangsa yang dibangun, dikembangkan dan dilestarikan didasarkan pada tafsiran resmi pemerintah (*official history*). Dari sini Negara memiliki kewajiban membentuk watak kebangsaan yang dilakukan melalui pendidikan, salah satunya dengan mata pelajaran sejarah melalui buku teks sejarah. (Sumaludin, 2018) Penulisan sejarah merupakan puncak dari segala galanya (Abdullah, 1985 hal XV) dalam sejarah, kumpulan fakta fakta yang masih mentah dimasa lalu, dilakukan penyeleksian, penyusunan, dan deskripsi atau pengisahan yang akan menjadi suatu karya tulis disebut historiografi (Gottschalk, 2008 hal 7-8). Buku teks sejarah polri merupakan salah satu bentuk historiografi yang dibuat berdasarkan dengan landasan filosofis sistem Pendidikan Polri pasal 4 point b (Perkapolri No.14 tahun 2015) yaitu untuk membentuk insan polisi yang memiliki etika moral yang terpuji yang tercermin dalam perilaku penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Buku Teks merupakan salah satu dari historiografi yang digunakan sebagai sarana dalam pembelajaran, yang dijadikan media bagi pengajar untuk menyampaikan materi kepada siswa. Buku teks biasanya ditulis oleh guru ataupun pakar, yang di dalamnya terdapat tujuan pedagogis serta mengacu pada suatu disiplin ilmu tertentu, Buku teks sejarah juga merupakan bentuk praktek pewacanaan identitas nasional, teks-teks yang terkandung didalamnya tentu saja mengakomodir pengetahuan-pengetahuan tertentu dan menyingkirkan sebagian lain (Heychael, 2012: 13). Sedangkan Ratmelia (Ratmelia, 2018) Buku teks adalah semua buku yang digunakan sebagai dasar atau bagian dari fokus pembelajaran, ditulis secara khusus dan berisi pengetahuan-pengetahuan yang terpilih dan sistematis. Setiap topiknya dipilih dengan tujuan keutuhan dan ketertarikan topik yang satu dengan topik lainnya. Buku teks sejarah ini dibuat sederhana sesuai dengan tingkat siswa dan penuh dengan aneka ragam perlengkapan belajar mengajar untuk memenuhi fungsi belajar yang diinginkan. demikian halnya juga dengan buku teks pelajaran sejarah perjuangan polri yang dijadikan suatu sumber serta media bagi pelatih untuk menyampaikan materi tentang kiprah perjuangan polri dan kaitannya dengan peristiwa yang pernah terjadi dimasa lalu

kepada siswa pendidikan polri dalam bentuk historiografi buku teks. Buku teks yang dimaksud terdapat uraian materi yang merupakan hasil konstruksi pemikiran penulis buku akan menjadi masalah pula di lapangan bagi guru yaitu bagaimana buku tersebut diajarkan (Mulyana, 2009).

Historiografi buku teks dalam pembelajaran sejarah menurut Mulyana, (Mulyana, 2013) adalah rekonstruksi materi pelajaran sejarah yang disusun pada buku dalam bentuk uraian narasi yang dijadikan rujukan materi dalam mata pelajaran sejarah, dalam hal ini pada mata pelajaran sejarah juang polri, sedangkan historiografi menurut Sjamsuddin merupakan suatu metode yang dilakukan oleh sejarawan yang terdiri dari penafsiran dan pengelompokan fakta dalam berbagai hubungannya, formulasi dan presentasi hasil hasil penafsiran yang sebelumnya sudah dilakukan dan melakukan operasi operasi sintesis yang menuntun dari kritik sumber menjadi suatu penulisan teks yang sesungguhnya yang didalamnya harus memperhatikan syarat-syarat keilmiah seperti sumber fakta yang digunakan, kebenaran fakta, pendekatan penafsiran terhadap fakta, aspek keruangan, aspek waktu, dan lain-lain. Secara idealnya antara misi pendidikan dan penggunaan kaidah keilmuan dalam historiografi buku teks sejarah terjadi sinkronisasi diantara keduanya. (Sjamsuddin, 2016 hal 99).

Hal hal yang sering menjadi masalah dalam historiografi buku teks pembelajaran sejarah adalah adanya dualisme yang saling bertentangan terhadap arah konten yang akan ditulis, menurut Mulyana dari dualisme tersebut yang pertama historiografi dalam buku teks menuntuk akan objektivitas terhadap isisnya yang didasarkan pada kaidah kaidah kebenaran ilmu yakni epistemologi (metodologi), ontology dan semantik, sedangkan tuntutan kedua menitik beratkan buku teks sebagai alat pendidikan sejarah yang memiliki misi ideologis, mengapa demikian, kepolisian adalah alat negara untuk menegakkan hukum dimasyarakat, sehingga seorang polisi harus memiliki jiwa ideologi dan nasionalisme yang baik agar terciptanya penegakan hukum yang tepat (Mulyana, 2013).

Noam Chompsky (dalam H.A.R. Tilaar, 2003:61) mengungkapkan:

The indoctrination is necessary because schools are, by and large, designed to support the interest of the dominant segment of society these people who have wealth and power. Early on in your education you are socialized to understand the need to support the power structure, primarily corporation - the business class

Chompsky berpandangan perlunya indoktrinasi ideologi dalam sekolah dikarenakan sekolah harus mendukung kepentingan masyarakat yang dominan, masyarakat harus mendukung struktur kekuasaan yang ada. Agus Mulyana juga menyatakan dalam bahwa kepentingan penanaman nilai atau ideologi dan kepentingan kajian kritis dalam buku teks seharusnya dapat dipadukan. Ideologi atau nilai-nilai dapat tertanam dalam diri siswa ketika membaca buku teks pelajaran sejarah secara kritis, bukan penanaman ideologi atau nilai-nilai yang bersifat indoktrinasi. Membaca buku teks pelajaran secara kritis lebih mengembangkan kebenaran yang berangkat dari daya nalar siswa ketika membaca perjalanan sejarah bangsanya. Hal ini senada dengan teori kekuasaan dari Foucault yang menyatakan bahwa kekuasaan dan pengetahuan adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan karena kekuasaan menemukan bentuknya dalam pengetahuan, setiap pengetahuan pasti mengandung kuasa dan setiap kekuasaan produktif menghasilkan kehendak untuk mengetahui (Heychael, 2012: 19). Jadi kaitan antara kekuasaan dan pengetahuan dalam konteks buku teks sebagai penunjang pembelajaran sangat berkaitan erat dan sesuatu yang tidak bisa mungkin dipisahkan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif, Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis (Moleong 2017 hal 6) prosedur analisis dimaksud adalah analisis isi yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dalam buku teks (Mulyana, 2013). Buku teks yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narasi yang ada pada buku teks sejarah Polri untuk tamtama polisi tugas umum tahun 1980, alasan pemilihan buku ini dikarenakan belum ada yang menganalisis buku teks pelajaran dikalangan militer khususnya kepolisian, buku ini juga dibuat oleh Lembaga Pendidikan dan latihan kepolisian sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam Pendidikan kepolisian. Tehnik yang digunakan penulis melakukan pemaknaan terhadap narasi dari buku teks (Mulyana, 2013). Pemaknaan buku teks sejarah Polri ini dengan menggunakan dua konsep yaitu Nasionalisme dimana pada nasionalisme sangat memiliki unsur ideologisasi dalam pemaknaan peristiwa sejarah yang dijabarkan pada buku pelajaran sejarah Polri ini.

PEMBAHASAN

Narasi Nasionalisme

Seperti yang dipaparkan sebelumnya Penulisan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari penguasa, begitupula penulisan buku teks sebagai penunjang dari ilmu pengetahuan juga tidak luput darinya, penguasa yang memimpin negeri menghendaki terciptanya keamanan dalam negeri hal tersebut, Nasionalisme satu negara dengan negara lain memiliki sejarah yang berbeda, Nasionalisme merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling tidak dalam seratus tahun terakhir. Tak ada satu pun ruang sosial di muka bumi yang lepas dari pengaruh ideologi ini. Nasionalisme menurut Ernest Renan dalam (Suastika, 2012) berasal dari kata nation (negara) dimana jiwa dan semangat membentuk ikatan Bersama baik dalam hal kebersamaan maupun dalam pengorbanan. Sedangkan Abdul Jalil mengartikan nasionalisme adalah kesatuan solidaritas masyarakat yang dibangun oleh perasaan kebersamaan yang berakibat kesediaan saling berkorban dalam waktu yang lama serta kesediaan untuk melanjutkannya dimasa kini dan masa yang akan datang yang dilandasi oleh kebersamaan untuk mewujudkan cita-cita Bersama (Widodo, 2011) Benedict Anderson mengemukakan bahwa kesadaran nasionalisme adalah sebagai "warisan" atau sebagai "proyek bersama" (Abidin, 2017).

Nasionalisme lahir dari historiografi Indonesia karena adanya persandingan antara historiografi yaitu kolonialisme (belanda) dan nasionalisme (Mulyana, 2013) dimana penulisan historiografi Indonesia awalnya bercorak belanda sentris sampai Indonesia merdeka, namun setelah seminar sejarah nasional 1957 yang mengangkat isu dekolonisasi historiografi dan pentingnya kesadaran sejarah sebagai edukasi kesadaran nasional (Abidin, 2017) Bahasa dalam bentuk narasi tulisan sejarah memiliki arti yang sangat penting. Sejarah dalam bentuk sebuah tulisan dapat masuk dalam bagian seni karena dalam sejarah ada unsur cerita (Mulyana, 2009)

Struktur penulisan dari buku ajar sejarah Polri berbentuk dalam sejarah politik hal ini terlihat dimana penulis membuat periodeisasinya berdasarkan kekuasaan yang ada, dimulai dari belanda, Jepang dan sampai orde lama. Sedangkan narasi nasionalisme terselip didalam paragraf yang terdapat dalam buku teks, Struktur anatomi narasi Nasionalisme dapat dilihat pada bagi kutipan kutipan berikut ini :

*“ dalam tahun 1912 dibentuk polisi bersenjata, yang menjadikan alat kekuasaan sipil dalam tangan pemerintahan daerah yang baru “ (lemdiklatpol, 1980, hal 12)
 “segala sesuatu yang dikerjakan di Jawa dan Madura adalah dibawah semboyan
 “untuk kepentingan Jawa dan menang peperangan” juga dalam dinas kepolisian
 hal ini didengung dengarkan, dengan tujuan memberikan keinsyafan kepada
 anggota anggota kepolisian bangsa Indonesia akan itu dengan maksud
 mencapai prestasi setinggi tingginya untuk kepentingan peperangan “
 (lemdiklatpol, 1980, hal 17)*

Penulis menekankan kepada pembaca pada kata “alat kekuasaan sipil dalam tangan pemerintahan daerah baru” dan bahwa polisi sudah dari zaman penjajahan Jepang bahwa kepolisian sudah menjadi sebuah organisasi kekuasaan yang digunakan untuk mengamankan Indonesia di daerah daerah baru ditaklukan oleh Belanda atau daerah yang berkerjasama dengan Belanda. Hal ini diperkuat lagi oleh penulis pada zaman kedudukan Jepang di Indonesia, kepolisian ikut andil dalam perjuangan perang Asia Pasifik dimana kepolisian Indonesia menjadi salah satu kekuatan yang memiliki andil dalam peperangan tersebut. Pada bab kemerdekaan Indonesia narasi nasionalisme terdapat pada kutipan berikut ini :

Dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1949.... Dengan demikian djawatan kepolisian negara administrative memiliki kedudukan yang sama dengan dinas polisi umum dari pemerintahan Hindia Belanda , (lemdiklatpol, 1980, hal 24)

....uniform polisi tetap sediakala, hanya tanda matahari pada tutup kepala diganti dengan lambing kebangsaan merah putih bundar, dengan memakai garis tengah. Para agen polisi dan orang-orang yang diperbantukan kepada polisi semuanya memakai tanda ban merah putih berlukisan huruf “p” (lemdiklatpol, 1980, hal 25)

“ dengan segelintir tenaga yang ada, kepala djawatan sejak di Jakarta memulai dengan sungguh-sungguh usaha-usaha penyusunan alat kepolisian, suatu alat yang dapat memenuhi panggilan masa, suatu alat yang layak dalam suatu negara merdeka dan merdeka demokrasi, bukanlah kepolisian sebelumnya itu merupakan suatu alat kekuasaan dari penjajah, yang digunakan se-effectief-effectiefnya untuk menjaga kekuasaan kolonial “ (lemdiklatpol, 1980, hal 26)

“ bila nica mengadakan provokasi, polisi Bersama military police bertindak...” (lemdiklatpol, 1980, hal 25)

Pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 19 Agustus 1949 menghasilkan banyak sekali keputusan diantaranya adalah pembentukan 8 provinsi di Indonesia, penulis melakukan penekanan pada kata “*djawatan kepolisian memiliki kedudukan yang sama dengan kepolisian Hindia Belanda,*” dari uraian tersebut penulis menyatakan kepolisian Indonesia tidak tunduk kepada kepolisian Jepang maupun Hindia Belanda dan menyatakan diri sebagai Lembaga independent tidak ada intervensi lagi dari pihak luar. Hal ini juga terlihat pada kalimat “*bukan kepolisian sebelumnya itu merupakan alat kekuasaan penjajah*”. kata penjajah ini berarti terdapat dua konsep yaitu penjajah dan yang dijajah, kata penjajah untuk menunjukkan kerajaan Hindia Belanda yang berkuasa sebelum Jepang menduduki Indonesia. Pada Uraian berikutnya penulis ingin menjelaskan bahwa kepolisian Indonesia sejak awal kemerdekaan dalam kondisi yang serba terbatas namun berusaha untuk menjadikan diri sebagai alat yang

bisa melayani dan memenuhi panggilan masyarakat, penekanan kata “*suatu alat yang negara yang merdeka dan merdeka demokrasi*” dan polisi dan militer akan bertindak apabila ada yang melakukan provokasi, provokasi disini dianggap akan menyebabkan kekacauan kepolisian mengalami deprivasi relative terhadap penjajah pada saat dijajah, sehingga mereka menjaga betul jangan ada pemantik dari provokasi belanda (NICA) terhadap pribumi sebagai upaya memecah belah NKRI pada saat itu.

Pada uraian berikutnya terlihat jelas bahwa kepolisian dimasa itu memiliki rasa cinta terhadap negaranya yang sudah merdeka, dan dengan jelas penulis menunjukkan merdeka yang dimaksud adalah merdeka dalam ideologi yang diemban penguasa yakni demokrasi dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam negara Indonesia tanpa membedakan apapun sesuai dengan jargonnya “*vox populi vox dei*” suara terbanyak (rakyat) adalah suara tuhan. Selanjutnya narasi nasionalisme bisa kita lihat pada narasi peperangan nica dan rakyat Indonesia sebagai berikut :

Agresi belanda yang pertaman menyebabkan terganggunya sebentar pembangunan, karena polisi negara turut serta dalam usaha pertahanan. . . dan polisi dikerahkan juga untuk garis depan (lemdiklatpol, 1980, hal 30)

Dalam perundingan antara R.I dan belanda kepala kepolisian negara turut sebagai penasehat delegasi, (lemdiklatpol, 1980, hal 31)

... pimpinan jawatan mengeluarkan instruksi, bahwa pegawai pegawai dilarang mencampuri praktis politik, karena hanya polisi harus berada diatas semua aliran dan hanya menganut politik pemerintah (lemdiklatpol, 1980, hal 32)

“ untuk menghadapi tarafp keamanan, POLRI menjaga barisan depan dan lain angkatan menjadi barisan belakang. (lemdiklatpol, 1980, hal 33)

“ tiap tiap kantor polisi aktif turut dalam menemukan pelanggaran pelanggaran..... disamping itu polisi turut juga langsung dalam usaha usaha yang menyangkut pertahanan (lemdiklatpol, 1980, hal 19)

Uraian dari kutipan diatas menggunakan narasi “Agresi” dilakukan penulis untuk menekan bahwa konteks Indonesia sebagai negara yang berdaulat, seharusnya adalah adanya kontak senjata antara belanda dan rakyat Indonesia diserang oleh negara lainya yakni belanda, kemudian narasi “*polisi berada pada garis terdepan*” dan “*Polri menjaga barisan depan dan lain angkatan menjadi barisan belakang*” menunjukkan bahwa rasa cinta tanah air yang ada pada kepolisian pada saat itu sangat besar, hal ini dikarenakan diletakkan pada garis depan dalam konflik dengan belanda yang dibantu inggris, kemudian pada kutipan kedua penulis menunjukkan bahwa peran kepolisian pada saat itu sangat diperhitungkan oleh negara pada saat itu dimana saat perundingan antara Indonesia dan belanda kepala kepolisian pada saat itu menjadi “*penasehat*” delegasi. Kata penasehat dalam KBBI mengandung arti pemberi saran/ nasihat, konteksnya kepolisian memiliki andil besar dalam negoisasi tersebut. Pada kutipan ketiga, narasi “*polisi harus berada diatas semua aliran dan hanya menganut politik pemerintah*” penulis ingin menyampaikan bahwa walaupun pemikiran berkembang dimasyarakat beragam aliran(iversity), kepolisian hanya tunduk kepada politik ideologi yang dianut pemerintah, hal ini dilakukan agar terciptanya kestabilan nasional dan ketepatan dalam menegakkan hukum di masyarakat. Pada Kutipan kelima penulis ingin menunjukkan bahwa kinerja kepolisian yang professional sudah dilakukan pada saat penjajahan jepang dimana pelanggaran pelanggaran yang dilakukan didalam negeri jajahan ditindak tegas.

KESIMPULAN

Buku teks sejarah polri untuk tamtama polisi tahun 1980 merupakan salah satu karya historiografi yang digunakan untuk kepentingan Pendidikan dan pelatihan tamtama polisi tugas umum di sekolah polisi negara di Indonesia, sebagaimana lazimnya karya historiografi buku teks sejarah, haruslah mengikuti aturan dan kaidah kaidah dalam ilmu sejarah, yakni rekonstruksi dari fakta fakta sejarah yang ada dilapangan kemudian dilakukan penafsiran secara objektif, penafsiran didalam buku teks sejarah polri ini sangat dipengaruhi oleh pemerintah Sebagai pemegang kekuasaan, Anggota kepolisian harus dibentuk dengan landasan mental dan ideologi yang kuat, dari itu kebijakan yang dibuat pemerintah melalui pimpinan polri tercakup dalam kurikulum pembelajaran kepolisian yang sarat dengan ideologisasi untuk membentuk kadet kadet yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi sehingga bisa terciptanya penegakan hukum yang adil dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, T & Suryomiharjo A.1987. Ilmu Sejarah dan Historiografi : Arah dan Perspektif. Jakarta ; Gramedia
- Lemdiklatpol,. 1980. Buku Ajar Sejarah Juang Polri Untuk Tamtama Tugas Umum,; Jakarta. Lemdiklatpol Press
- Gottschalk. L, 2008, Understanding History : A Primer of Historical Method, terjemahan Nugroho Notosusanto. Mengerti Sejarah. Jakarta : UI Press
- Heychael, M. (2012). Identitas Nasional Dalam Buku Sejarah Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program Studi Pascasarjana Kekhususan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Tidak Diterbitkan
- H.A.R. Tilaar. (2003). Kekuasaan Dan Pendidikan. Magelang: Indonesiatera
- Nur Fatah Abidin. (2017). Menemukan Historiografis Indonesia. Yogyakarta. Ombak
- Moch, Ali. R. (2005). Pengantar Ilmu Sejarah Di Indonesia. Jakarta : PT Lukis Pelangi Aksara
- Moleong J Lexy. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Rosda
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015, Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Indonesia
- Sjamsuddin, Helius.(2016). Metodologi Sejarah. Yogyakarta, Ombak
- Supardan, D. (2007). Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah kajian pendekatan struktural. Jakarta : Bumi Aksara.

Tabah, A. (2013). *Polisi Indonesia*. Jakarta: Angkasa

Jurnal :

Abidin, N. F. (2017). Narasi Nasionalisme dan Logika Oposisi Biner dalam Buku Teks Sejarah dari Orde Baru hingga Post-reformasi. *Menemukan Historiografi Indonesiasentris*, (March), 436–460.

Lemdiklatpolri, L. P. dan L. K. R. (2010). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010. *To Bημα Τov Ασκληπιου*, 9(1), 76–99.

Mulyana, A. (2009). Pendekatan Historiografi Dalam Memahami Buku Teks Pelajaran Sejarah, 53(9), 1–19. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Mulyana, A. (2013). Nasionalisme Dan Militerisme: Ideologisasi Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah Sma. *Paramita: Historical Studies Journal*, 23(1). <https://doi.org/10.15294/paramita.v23i1.2498>

Ratmelia, Y. (2018). Nilai moral dalam buku teks pelajaran sejarah (analisis terhadap buku teks sejarah Indonesia Kelas X). *Jurnal Historia: Jurnal Pendidikan Dan Peneliti Sejarah*, 1(2), 115–122.

Suastika, I. N. (2012). Nasionalisme Dalam Perspektif Postmodernisme, Poststrukturalisme dan Postkolonialisme, 11(1), 1–15.

Sumaludin, M. M. (2018). Identitas Nasional dalam Buku Teks Pelajaran Sejarah. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 1(2), 97. <https://doi.org/10.17509/historia.v1i2.10709>

Utami, I. W. P. (2011). Representasi Ideologi Negara dalam Buku Sejarah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 0(9), 1–18. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Widodo, S. (2011). Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(1), 18–31.